BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Penelitian

Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang secara luas mencakup pengkajian mengenai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya. Sedangkan Batasannya dalam Hubungan Internasional adalah bahwa Hubungan Internasional mengkaji hal-hal atau aspek-aspek dari segi keterhubungan global atau yang melintasi batas wilayah entitas masing-masing negara. Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa Kerjasama (*Cooperation*), Persaingan (*Competition*), dan Pertentangan (*Conflict*).

Hubungan antar suatu negara dengan negara yang lain atau yang lebih dikenal dengan Hubungan Luar Negeri juga merupakan salah satu bidang kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional. Didalam Hubungan Luar Negeri terdapat dua instrumen utama yang mendukung proses tersebut yaitu Politik Luar Negeri (*foreign politics*) dan Kebijakan Luar Negeri (*foreign policy*) dengan demikian didalam hubungan luar negeri antara negara satu dengan negara lain yang lebih ditekankan adalah serangkaian atau seperangkat kebijaksanaan dari suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain atau

dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia yang kesemuanya itu didasarkan serta untuk memenuhi kepentingan nasional.

Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebaga "*high politics*" (Robert Jackson 1999 : 34)

Dalam interaksi hubungan internasional, konflik dan kompetisi merupakan hal-hal yang tidak bisa terhindar. Masalahnya adalah bagaimana menempuh langkah-langkah untuk membina upaya bersama guna mengurangi serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Sumber konflik bisa terletak pada keinginan untuk menguasai sumber-sumber daya alam dari negara lain serta egosentrisme masing-masing negara atau kesatuan sosial tertentu, yaitu aspirasi untuk terus meningkatkan kekuatan serta kesatuan sosial lainnya.

Untuk itu penulis mencoba untuk mengambil salah satu contoh konflik yang akan dijadikan objek penelitian yaitu mengenai konflik yang terjadi antar kelompok gerakan separatis Republik Maluku Selatan-Pemerintah Indonesia-Pemerintah Belanda yang masih belum menemukan titik penyelesaiannya sampai saat ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang RMS, penulis akan mencoba menjabarkan fakta tentang ciri-ciri mendasar dari masyarakat rentan Indonesia: 1) Tingginya tingkat segregasi sosial: 2) Rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi: 3) Terisolasi dalam pulau-pulau kecil

Secara historis masyarakat Ambon Maluku dipengaruhi oleh konstruksi politik kolonialisme Belanda dan masa Orde Baru. Daerah ini pernah dijadikan daerah jajahan dua negara Eropa, Portugis dan Belanda, namun Belandalah yang kemudian banyak memberi pengaruh karena berkuasa lebih dari empat abad. Pada pertengahan tahun 1949, wilayah Maluku pada umumnya dan pulau Ambon pada khususnya sedang dilanda kemelut, faktor

lokal dapat diruntukan sebagai berikut. Persoalan munculnya para penjajah sejak menginjakan kakinya di pasir putih Maluku, dimulai dengan bangsa Portugis dan kemudian dilanjutkan oleh Spanyol dan yang terakhir Belanda. Pada saat itu oleh para penjajah Maluku dibagi menjadi dua bagian yaitu Maluku Utara dan Maluku Selatan. DiMaluku Utara sendiri sejak itu telah berdiri dengan kukuh empat kerajaan Islam yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Dari keempat kerajaan Islam ini, kerajaan Ternatelah yang terkuat dan terlama bejaya. Hampir seluruh daerah pantai di Maluku Utara, sebagian pulau Seram, daerah Gorontalo di Sulawesi Utara dan Filipina Selatan diIslamkan oleh Kerajaan Ternate. Bangsa penjajah terutama Belanda, tidak punya pilihan selain berusaha menanamkan pengaruhnya di luar Kerajaan Ternate, yaitu daerah pedalaman Halamahera dan Maluku Selatan. Misi Kristen Protestan diizinkan Belanda berkiprah di daerah-daerah tersebut. Jadilah Maluku terbagi dua : bagian Utara mayoritas Islam, sedangkan bagian Selatan dominan Kristen Protestan.

Sejalan dengan politik memecah belah (*debvide et impera),* Belanda secara diskriminatif mendorong pembangunan pendidikan di Maluku Selatan yang mayoritas Kristen. Sejak saat itulah, terbentuklah suatu segregasi wilayah berbasis agama di Maluku. Warga Kristen Maluku Selatan yang berpendidikan banyak yang terserap ke dalam birokrasi Belanda, sedangkan yang tidak berpendidikan bergabung dengan tentara kolonial Belanda. Wujud segregasi sosial berbasis agama bahkan terus berlanjut ke tingkat kesatuan wilayah yang lebih kecil, di tingkat desa dan kelurahan dalam suatu kecamatan yang sama dapat ditemukan dengan mudah apa yang disebut dengan “kampung islam dan kampung kristen”. (Richard Chauvel 1990).

Sedangkan faktor supralokalnya adalah faktor politik pemerintah yang sangat sentralistik. Peran pemerintah yang mendominasi terhadap pemerintah daerah, bukan saja banyak sumber daya ekonomi yang tersedot ke pusat, tetapi juga konsentrasi perhatian dan komitmen pemerintah daerah lebih mendorong untuk menyenagkan pusat. Dan faktor yang

kedua yaitu intrusi sistem ekonomi kapitalisme pinggiran Orde Baru ke kota menengah dan kecil, termasuk Ambon.

Sejak awal tahun 1950 persoalan telah muncul yang dipicu oleh perbedaan sikap dalam menerima keputusan politik yang dihasilkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Pertemuan dihadiri oleh tiga pihak yang sedang bertikai untuk menentukan hari depan bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda setelah tiga setengah tahun diduduki oleh Jepang. Dari ketiga pihak yang bertikai tersebut yang pertama adalah Republik Indonesia yang menguasai Pulau Jawa Dan Sumatera, setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang lebih dikenal dengan sebutan Republiken, pihak ini bertekad untuk melepaskan diri sepenuhnya dari kekuasaan negeri Belanda, pihak kedua adalah Kerajaan Belanda yang merasa masih tetap memiliki bekas wilayah jajahannya, Hindia Belanda, sesudah wilayah subur makmur penghasil berbagai macam bahan mentah tersebut dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang selama berlangsung Perang Dunia II. Kemudian, sebagai Pihak Ketiga, sejumlah negara di wilayah bekas Hindia Belanda yang berhimpun dalam Bijzonder Federal Overlag (BFO) yaitu Federal dari Negara-negara Bagian di Indonesia yang didirikan oleh Belanda, dimana Maluku pun termasuk dalam negara-negara bagian BFO tersebut.

Pada satu sisi, KMB berhasil mencapai kesepakatan politik untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) di seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda dalam bentuk penggabungan pemerintah RI dan BFO. Di sisi lain, KMB masih meninggalkan dua persoalan utama : pertama, tertundanya penyelesaian mengenai status wilayah Irian Barat, dan kedua, masih belum jelasnya penyelesaian masa depan para pasukan kolonial Koninkiljke Nederlands Indisch Leger (KNIL) khususnya mereka yang menolak untuk diintegrasikan ke dalam TNI, bekas lawan mereka selama Perang Kemerdekaan Indonesia (Julius Pour 2008 : 2).

Puncaknya terjadi tanggal 25 April 1950, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Mantan Jaksa Negeri Indonesia Timur (NIT), Dr C.R.S. Soumokil bersama rekan-rekannya memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menetapkan kota Ambon sebagai pusat pemerintahan mereka. Proklamasi RMS tersebut juga didukung sisa-sisa pasukan KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger)* terutama bekas pasukan khusus KST (*Korps Speciale Troepen*) yang secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS) sekaligus menolak perintah untuk melakukan demobilisasi. Adapun faktor-faktor Kemunculannya RMS diantaranya (1) pada masa penjajahan pemerintahan Belanda, masyarakat Maluku telah banyak diberikan fasilitas pendidikan dan menarik masyarakat Ambon yang beragama Kristen untuk menjadi bagian dalam pemerintahannya, terutama ke dalam birokrasi dan tentara. Jika dibandingkan dengan pemerintah Indonesia yang pada saat itu hanya memusatkan perhatian pada daerah-daerah tertentu saja (sentralistik). Sehingga membuat masayarakat Ambon Maluku lebih makmur dibawah kepemimpinan Belanda (2)berkaitan dengan orang-orang pro Belanda yang merasa terancam kedudukan jika Indonesia benar-benar merdeka (T May Rudy 2003 : 87)

Meski selama lima tahun terakhir pasukan KNIL, bahu-membahu bertempur bersama KL melawan pasukan republik, setelah persetujuan KMB ditandatangani apa yang disebut Hindia Belanda sudah tidak ada. Dengan demikian, para anggota KNIL tersebut lantas bagaikan anak ayam kehilangan induknya, tak tahu harus lari kemana. Didera oleh perasaan putus asa, sebagaian dari mereka kemudian menjadi pendukung RMS.

Pada awalnya, walau menyadari bahwa proklamasi RMS merupakan pembangkangan yang harus ditumpas, RIS masih mencoba membujuk mereka dengan mengirim misi perdamaian. Sejumlah tokoh asal Maluku, dipimpin oleh Dr. Johanes Leimena dan dibantu Putuhena, Pellaupessy dan Rehatta, dikirim ke Ambon untuk menemui Soumokil dan teman-

temannya. Misi tersebut mengalami kegagalan kerana kelompok garis keras RMS langsung menutup pintu dan tidak bersedia bertemu. Setelah menghadapi kemacetan jalan damai semacam ini, tidak ada lagi pilihan lain dari pemerintah selain menggunakan cara militer.

Gerakan separatis RMS ini pun secara langsung telah mengancam keutuhan bangsa dan melunturkan rasa Nasionalisme terhadap bangsa dan tanah air. Dimana Nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Kondisi nasionalisme suatu bangsa akan terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dengan Nasionalisme yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat dielakkan. Dari Nasionalisme akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme.

Untuk menggagalkan misi RMS yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusatpun memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Maka dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda (Julius Pour 2008 : 3)

Keikut campur tangan Belanda terhadap masalah ini mulai terlihat pada tahun 1951 dimana sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya yang jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang, mengungsi ke Belanda, yang pada saat itu diyakini oleh pemerintah NKRI hanya untuk sementara saja. Oleh karena kemerdekaan RMS yang di Proklamirkan oleh sebagian besar rakyat Maluku, pada tanggal 24 April 1950 di kota Ambon, ditentang oleh Pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno - Hatta, maka Pemerintah RI meng-

ultimatum semua para aktifis RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepada pemerintah RI, sehingga semua aktivis RMS itu ditangkapi dan dimasukan ke dalam sel-sel penjara oleh Pasukan-pasukan Militer yang dikirim dari Pulau Jawa. (http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan diakses tanggal 29 Oktober 2010).

Karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh militer Pemerintah RI, maka para pimpinan teras RMS tersebut, ber-inisiatif untuk menghindar sementara ke Negeri Belanda, kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan adanya kesediaan bantuan dari Pemerintah Belanda untuk mengangkut sebagian besar rakyat Maluku dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda, maka sebagian besar rakyat di Maluku yang beragama kristen, memilih dengan kehendaknya sendiri untuk pindah ke Negeri Belanda. Pada waktu itu, Ada lebih dari 15.000 rakyat Maluku yang memilih pindah ke negeri Belanda. Pindahnya sebagian rakyat maluku ini, oleh Pemerintahan Sukarno-Hatta, diissukan sebagai "PENGUNGSIAN PARA PENDUKUNG RMS", lalu dengan dalih pemberontakan, pemerintah RI menangkapi para Menteri RMS dan para aktifisnya, lalu mereka dipanjarakan dan diadili oleh pengadilan militer RI, dengan hukuman berat bahkan dieksekusi Mati. (http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan diakses tanggal 29 Oktober 2010).

Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tidak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal

dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.

Pemerintah Belanda pun secara tidak langsung mendukung kemerdekaan RMS yakni dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para petinggi RMS untuk menjalankan pemerintahannya di Belanda, Belanda terus memberikan ruang gerak yang leluasa kepada aktivis pro-RMS di negaranya. dimana memberikan kebebasan kepada pemerintah RMS untuk tetap menjalankan semua kebijakan layaknya sebuah pemerintahan yang memiliki lembaga sosial, politik, keamanan, dan luar negeri. Namun di tahun 1978 RMS kembali melakukan kehebohan melalui serangan yang terjadi di Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS, dimana Belanda tidak menepati janji yang diberikannya untuk pengungsian para pendukung RMS yakni suatu saat mereka akan kembali ke “Ambon yang bebas” Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS mengalami frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula, oleh karena Belanda belum menyelesaikan masalah antar Pemerintah Indonesia - Para Aktivis RMS tetapi telah menerima kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia yakni Soeharto di Belanda, dimana salah satu agenda dalam kunjungan Soeharto ke Belanda yaitu ingin membahas masalah para aktivis RMS yang berada di pengasingan Belanda agar dapat kembali lagi ke Indonesia, Maluku (Levi Silalahi, PDAT, TNR tempointeraktif.com Rabu, 12 Mei 2004).

Menurut Chris Pattipeilohi: "Pemerintah Belanda dengan tindakan itu menyangka bahwa kami, yang lahir dan besar di sini akan menyesuaikan diri dan melupakan Ambon. Tapi jangan harap itu akan terjadi. Kami akan ambil oper perjuangan orang tua kami".

Belanda mereka anggap pengkhianat karena konon pernah menjanjikan mulai 25 Oktober 1946 akan memberikan status otonom pada Maluku Selatan, hanya janji belaka yang belum terpenuhi sampai saat ini. Merasa dikecewakan tumbuhlah suatu pikiran di benak mereka bahwa "Ambon hanya dapat dibangun oleh orang Ambon". Dan untuk itu, "Ambon harus merdeka dulu". Akibatnya bukan cuma mendorong anak-anak RMS setiap kali berdemonstrasi. Tapi menurut mereka, belajar segiat-giatnya, agar dapat mengabdi pada suatu impian yakni Ambon yang merdeka. (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1975/02/15/NAS/mbm.19750215.NAS66336.id.html diakses pada tanggal 20 Oktober 2010).

Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sebagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar. Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan) diakses tanggal 29 Oktober 2010)

Isu RMS pun kembali menguak pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, dimana RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan

teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.

Gerakan separatis itu dihidupkan kembali setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, terutama oleh tokoh-tokoh warga keturunan Maluku di Belanda. Eksisnya RMS di Belanda memberi angin segar bagi bangkitnya lagi harapan pada sebagian kecil rakyat Maluku. Maka, terjadilah peristiwa 29 Juni 2007 ketika beberapa elemen aktivis RMS menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pejabat, dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. Para tamu undangan yang hadir pada saat itu mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi. Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.

Lagi-lagi para aktivis RMS kembali membuktikan ke eksistensian mereka dengan merebak kabar tentang sebuah perjuangan di pengadilan Den Haag, Belanda, yang menginginkan agar Presiden RI ditangkap ketika menjejakkan kakinya di Belanda. Di tengah rencana kunjungan Presiden RI ke Belanda tanggal 5-9 Oktober 2010. Presiden RMS di perantauan di Belanda, John Wattilete, bersama pengikutnya, tiba-tiba mengajukan permohonan ke sebuah pengadilan di Den Haag agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera ditangkap. Meski pengadilan kemudian menolak, tentu saja hal itu mempermalukan pemimpin dan rakyat Indonesia. Kasus itu menambah panjang masalah dalam hubungan Indonesia-Belanda. Kita berpikir, tidak ada perlindungan bagi gerakan itu di Belanda.

pertanyaan kita, mengapa Belanda masih membiarkan RMS hidup di sana jika negara kerajaan itu sudah mengakui kemerdekaan RI atau jika Den Haag tetap ingin menjaga hubungan baiknya dengan Jakarta? Jika alasannya adalah kebebasan berekspresi dan berorganisasi, kita juga boleh berargumentasi bahwa tidak sah bagi Belanda merongrong keutuhan negara lain, termasuk RI. John Wattilete, selain memohon ke pengadilan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditangkap, juga mendesak Indonesia melepas aktivis RMS yang ditahan pasca insiden tarian cakalele pada tahun 2007 dan menunjukkan tempat kuburan Presiden RMS pertama Soumokil setelah dieksekusi oleh tentara Indonesia. Ia juga menegaskan, kini ada 50.000 warga keturunan Maluku di Belanda sebagai kekuatan RMS. (http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan diakses tanggal 29 Oktober 2010).

Masalah ini pun berujung pada pemabatalan kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Belanda karena melihat adanya pergerakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang berencana mengajukan Presiden SBY ke pengadilan Den Haag atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap aktivis RMS yang ditangkap di Maluku. Pembatalan itu pun menuai sejumlah komentar. Ada yang apresiatif dengan alasan menyelamatkan harga diri bangsa, ada juga yang reaktif dan menganggapnya sebagai sikap berlebihan.

Tujuan dari kegiatan aktivis RMS tiada lain untuk menarik perhatian pemerintah, dan memancing-mancing reaksi keras dari pemerintah, sekaligus guna menunjukkan eksistensi mereka di dalam negeri yang terus dipantau dan mendapat suplai dukungan dari RMS di Belanda untuk menginternasionalisasikan isu RMS di Maluku, sambil berharap pemerintah Belanda yang tidak menutup kemungkinan masih ‘berhasrat’ untuk ‘memainkan’ Indonesia melalui isu-isu RMS demi kepentingan mereka.

Pada tanggal 17 Agustus 2005 silam, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, datang ke Jakarta untuk menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-60 dan menyampaikan pengakuan secara de facto atas Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus

1945. Rencananya, kunjungan Presiden RI Oktober mempunyai agenda salah satunya untuk melakukan penandatanganan dokumen tentang pengakuan secara de facto tersebut antar pemerintah RI dengan pemerintah Belanda. Batalnya kunjungan itu secara otomatis juga 'membatalkan' penandatanganan sebuah dokumen penting, bukti tertulis sebuah pengakuan. Memang dokumen ini tidak begitu jadi persoalan krusial, tetapi tetap saja penting. Adanya dokumen yang ditandatangani itu akan makin memperkuat posisi pemerintah RI atas wilayah-wilayah jajahan Belanda dulu, termasuk Maluku dan Papua. Jika ini terjadi, pihak-pihak luar, seperti Amerika yang getol mempermainkan isu Papua demi keberlangsungan kontrak Freeport akan melemah, karena Belanda sudah mengakui secara tertulis kemerdekaan Indonesia dengan segala konsekuensinya berupa pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang Belanda serahkan kepada pemerintah RI. Karena itu, tidak menutup kemungkinan ada politisasi dari kunjungan Presiden SBY ke Belanda dengan tujuan 'menggagalkan' penandatanganan itu. Dengan demikian, pembatalan kunjungan itu menunjukkan keberhasilan 'propaganda' di Belanda melalui RMS. Belanda membiarkan RMS beraktivitas 'melawan' Indonesia, hingga pengadilan di Den Haag akan mengabulkan pengajuan tuntutan RMS, bisa saja dimaknai sebagai 'dukungan terselubung' terhadap eksistensi RMS dan resistensi yang RMS timbulkan di Maluku dengan segala aktivitas provokatifnya.

RMS hingga saat ini terbukti masih eksis, dan jika tidak segera ditangani secara tepat akan menjadi isu internasional yang dilirik dunia. Model penyelesaian yang militeristik terhadap RMS hanya akan memadamkan api sesaat, tetapi tidak bara merahnya. Cara-cara militer juga berpotensi melanggar HAM. Tuduhan adanya pelanggaran HAM terhadap aktivis RMS bisa jadi ada benarnya, apalagi jika melihat pembatalan kunjungan itu dengan alasan ada gerakan RMS yang menuntut Presiden SBY agar ditangkap. Pemerintah juga tidak mesti serta merta menganggap Belanda akan mempermalukan Presiden SBY yang tengah membangun citra baik di dunia karena bercita-cita ingin menjadi Sekjen PBB setelah 2014

nanti. Padahal, Belanda sudah menegaskan akan menjamin penuh keselamatan Presiden SBY.

Hubungan dan kerjasama Indonesia - Belanda cukup baik, meski memiliki sejarah pahit di masa lalu. Tetapi, seperti umumnya negara-negara di Eropa yang sangat menghargai penegakan HAM, Belanda juga tidak bisa mencegah RMS atau kelompok-kelompok sipil mana pun untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di Den Haag, tetapi Belanda juga tidak boleh lupa bagaimana di masa lalu selama menjajah Indonesia banyak sekali melakukan kejahatan perang dan pelanggaran HAM terhadap warga Indonesia. Belanda sudah mengakui kemerdekaan RI, yang dengan demikian mengakui eksistensi negara berdaulat RI, dan mengakui RMS sebagai separatisme di wilayah RI. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga jangan 'cengeng' dengan gertakan RMS. Perhatian serius pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Maluku dengan sendirinya akan menggerogoti eksistensi RMS.

Untuk itu RMS sudah menjadi tugas besar bagi Pemerintah Indonesia untuk mencari titik penyelesaian agar segera tuntas sehingga tidak menjadi konflik yang berkepanjangan, baik antara RMS-Pemerintah Indonesia-Pemerintah Belanda dan tidak akan berdampak pada hubungan luar negeri antar Indonesia-Belanda. Setelah melihat penjelasan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah ini dengan judul :

"Dampak Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia – Belanda (Tahun 2007-2010)".

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa mata kuliah pokok yang dipelajari di pengantar Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Ssoial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Pengantar Hubungan Internasional, Mata kuliah ini mengajarkan tentang bagaimana suatu tatanan dalam sistem hubungan internasional dan aspek politik dari hubungan antar negara.

2. Isu – isu Global, Mata Kuliah ini menjelaskan mengenai isu – isu global atau pun masalah – masalah yang terjadi saat ini, termasuk salah satunya mengenai gerakan separatis RMS yang diisukan sebagai isu adu – domba bentukan Belanda sehingga berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Belanda.

3. Analisi Politik Luar Negeri, Mata Kuliah ini menjelaskan mengenai sifat politik luar negeri dan menganalisa tentang bagaimana serangkaian atau seperangkat kebijakan – kebijakan suatu negara dalam melakukan serangkaian interaksi dengan negara lain.

4. Politik Luar Negeri, Mata Kuliah ini mengajarkan tentang interaksi dalam sistem internasional dimana negara merupakan aktor utama yang melakukan transaksi yang terbentuk oleh adanya tuntutan serta tanggapan yang terjadi sewaktu interaksi berlangsung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas nanti, mengingat permasalahan yang ada masih terbilang luas dan sangat kompleks. Maka peneliti akan mencoba mengidentifikasikan masalah yang diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apa sajakah yang melatarbelakangi misi dari gerakan separatis Republik Maluku Selatan untuk memisahkan diri dari NKRI?
2. Mengapa Belanda membiarkan Republik Maluku Selatan (RMS) hidup disana, jika negara itu sudah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ?
3. Apakah aksi-aksi para aktivis RMS tersebut murni sebagai aspirasi rakyat di sana atau ada unsur provokasi, atau setidaknya dukungan dari luar ?

4. Apa sajakah yang diberikan Belanda terhadap perkembangan dan eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) khususnya dalam setiap aksi penentangan terhadap pemerintah Indonesia ?

1.3 Pembatasan Masalah

Pada pembatasan masalah penelitian ini penulis akan menggambarkan dan menjelaskan pada kajian Dampak Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia – Belanda dari tahun 2007 sampai dengan 2010. Tahun 2007 dikarenakan pada tahun ini, setelah sekian lama tidak terdengar, isu RMS kembali muncul kepermukaan dengan membuat ulah yang sangat menghebohkan tepatnya pada tanggal Juli 2007 Dalam perhelatan Hari Keluarga Nasional ke-14 di stadion Merdeka, Ambon, yang dihadiri oleh Presiden SBY, sekitar 28 orang pemuda dari pulau Haruku berhasil menembus pengamanan presiden dan melakukan seleberasi tarian cakalele (tarian perang) sambil berusaha mengibarkan bendera RMS. Sedangkan dibatasi pada tahun 2010 dikarenakan pada tahun ini lah RMS kembali muncul dengan ulah yang sangat menghebohkan seluruh dunia, dan berpengaruh sangat besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia – Belanda yakni Republik Maluku Selatan (RMS) yang berencana mengajukan Presiden SBY ke pengadilan Den Haag atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap aktivis RMS yang ditangkap di Maluku. Tidak hanya ancaman pengajuan ke pengadilan, mereka juga meminta pengadilan Den Haag menangkap Presiden SBY.

1.4 Perumusan Masalah

Dengan melihat pada hasil uraian yang sudah dipaparkan penulis pada bagian Identifikiasi dan Pembatasan Masalah, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang patut untuk dibahas dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

Bagaimana Dampak Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia – Belanda (Tahun 2007-2010) ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar campur tangan Belanda di balik eksistensi RMS dan resistensi yang RMS timbulkan di Maluku dengan segala aktivitas provokatifnya untuk melawan pemerintah Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan hubungan luar negeri Indonesia – Belanda pasca proklamasi kemerdekaan RMS yang merupaka Isu adu-domba bentukan Belanda.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan eksistensi RMS di pengasingan (di Belanda) sampai saat ini (Tahun 2007 – 2010)
4. Untuk mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Maluku pasca merebaknya isu RMS dibalik masalah – masalah yang ditimbulkan oleh para aktivis RMS

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori – teori Ilmu Hubungan Internasional serta dapat memberikan wawasan bagi para peneliti dan para akademis Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, serta untuk menambah wawasan mengenai perkembangan hubungan luar negeri Indonesia – Belanda pasca proklamasi kemerdekaan RMS.
3. Dan bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah dan meningkatkan teraf pemikiran yang luas dalam menganalisis obyek permasalahan yang diteliti.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Defenisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka penelitian ini, secara teoritis dibutuhkan adanya suatu kerangka pemikiran yang dapat berguna dalam menguji konsep – konsep dasar yang dipergunakan dalam studi ilmu hubungan internasional ketika meneliti suatu fenomena yang ada. Kerangka pemikiran ini diartikan sebagai konsep – konsep, model, analogi – analogi, pendekatan, generalisasi dan teori – teori yang dapat merangkum semua pengetahuan secara sistematis. Yang kesimpulannya bahwa, teori ini akan memberikan suatu kerangka pemikiran bagi uapaya penelitian. Upaya ini juga tidak terkecuali yang mendasari akan adanya suatu penelitian didalam disiplin ilmu hubungan internasional.

Ilmu Hubungan Internasional sendiri menurut B. Kusumohamidjojo dalam bukunya *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis* dapat diartikan sebagai :

> "Suatu studi yang mempelajari tentang interaksi antara negara-negara di dunia dalam sistem internasional"(Kusumohamidjojo, 1987 : 9)

Sedangkan mengenai cakupan hubungan dan jenis interaksi hubungan internasional Mas'oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* menjelaskan:

> "Hubungan internasional didefenisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara , organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar dari studi ilmu hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilkau ini biasa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internsiona" (Mas'oed dalam Mochmad Yani, 2005 : 5)

Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya secara sendiri, tetapi melibatkan negara-negara lainnya sehingga membentuk adanya interaksi internasional, maka dalam melaksanakan hubungan atau interaksi dengan negara-negara lain dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan merumuskan berbagai kebutuhan tersebut dalam suatu formula kebijakan yang dinamakan politik luar negeri. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan suatu *action theory* atau kebijakan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam ilmu hubungan internasional terdapat sebuah interaksi internasional yang melewati batas-batas negara atau yang dikenal dengan organisasi internasional yang merupakan suatu wadah dimana interaksi tersebut diatur untuk menjaga kerjasama antar negara, adapun gerakan separatisme yang secara umum memiliki persamaan perspektif dengan oraganisasi internasional, sehingga untuk membedakan kedua interaksi tersebut penulis akan mencoba untuk menguraikan dalam bentuk defenisi.

Teuku May Rudy dalam buku Administrasi dan Oraganisasi Internasional memaparkan pengertian Oraganisasi Internasional sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan fungsinya secara berkesinamubungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda." (Rudy, 2005:3)

Menurut Clive Archer dalam bukunya Internasional Organization menyatakan bahwa :

> "Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan persetujuan antara sedikit dua negara yang berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan-kepentingan bersama dan membangun kerjasama yang luas dengan institusi-institusi lain, walaupun tidak termasuk kepada lembaga-lembagayang berorientasi pada keuntungan"

Sedangkan pengertian Gerakan Separatisme menurut Julius Pour dalam bukunya "Dari Mengusir Kempeitai Sampai Menumpas RMS" memaparkan bahwa:

> "Gerakan Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius" (Julius Pour 2008 : 3)

> Sedangkan menurut Ikrar Nusa Taluhela : "Gerakan Separatisme muncul akibat berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik dan penggunaan kekerasan yang melanggar HAM sehingga timbullah pergerakan untuk membebaskan dan memerdekakan diri". (Ikrar Taluhela 1990 : 22)

Berdasarkan defenisi diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa Gerakan Separatis pada dasarnya berbeda dengan Organisasi Internasional, walaupun mempunyai struktur yang sama serta undang-undang dan peraturan yang mengaturnya namun perbedaannya terlihat jelas pada tujuan dari kedua interaksi tersebut, dimana Organisasi internasional mempunyai tujuan yang jelas sedangkan Gerakan Separatis mempunyai tujuan yang radikal yaitu ingin memisahkan diri dari negara kesatuan.

Untuk itu gerakan separatis RMS merupakan suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari negara kesatuan Republik Indonesia (RI). Gerakan ini muncul akibat beberapa faktor seperti faktor ideologi, ketidak adilan dan kesejahteraan khususnya dalam hal ekonomi dan pembangunan.

Sebelum membahas lebih jauh tentang politik luar negeri, penulis akan mencoba untuk mengemukakan teori tentang Ilmu Politik yang kaijiannya lebih luas dibandingkan dengan Politik Luar Negeri yakni:

> "Menurut Roger F.Soltau ilmu politik mempelajari negara,tujuan – tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara adan warga negaranya serta dengan negara-negara lain" (Soltau, 1962 : 4).
>
> Sedangkan menurut Ossip K: "Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara".

Dalam Hubungan Internasional terdapat aktor-aktor negara dan non-negara yang menjalankan aktivitas-aktivitas interaksi seperti kerjasama, persaingan dan konflik. Semua hal tersebut merupakan pola aktivitas politik internasional yang menjadi ajang penerapan politik luar negeri. Politik luar negeri seperti yang dijelaskan Sumpena Prawirasaputra dalam bukunya *Politik Luar Negeri*, yaitu:

> "Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan –tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi yang lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya, ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologinya. Respon tesebut mempunyai latar belakang dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya di manifestasikan sebagai falsafah bangsa dan di akomodasikan dalam konstitusi" (Prawirasaputra, 1958 : 2).

Sedangkan menurut Perwita dan Yani dalam buku *Pengantar Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formulasi nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 47)

Politik luar negeri muncul apabila suatu pemerintahan merasa perlu untuk bereaksi atau tidak bereaksi terhadap suatu keadaan yang berada diluar sistem politiknya. Adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan adalah penjelasan yang diberikan James N. Roseneau dalam buku-nya yang berjudul *The Scientific Study of Foreign Policy* untuk menalaah bagaimana politik luar negeri suatu negara timbul:

> "Berbagai faktor yang berupa situasi dan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi pemerintah suatu negara untuk menjaga agar politik luar negerinya tetap sesuai (*adptive*). Melalui politik luar negeri,

> suatu negara mengharapkan perubahan-perubahan situasi agar tidak membahayakan eksistensi negara tersebut, baik eksistensi yang menyangkut politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan".(Roseneau, 1980 : 27-92)

Pola tindakan yang dilakukan para aktor dalam politik luar negerinya dapat mempengaruhi aktivitas, sikap atau respon, serta interaksi para aktor-nya seperti bergesernya hubungan persaingan ke arah kerjasama, atau pergeseran kerjasama ke arah konflik. Konsep pengaruh dalam penelitian ini didasarkan pada dua defenisi yaitu menurut Alvin Z. Rubenstein dan K. J. Holsti. Konsep pengaruh menrutu Alvin Z. Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influence in the Third World* digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara melakukan perubahan kebijakan:

> "Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya. Sebagai "hasil yang timbul dari kondisi atau situasi tertentu sebagai sumber" dengan syarat terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil". (Rubenstein 1976 : 3-6)

Sedangkan konsep pengaruh menurut K. J. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu kerangka Analisis* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan mempengaruhi-dipengaruhi dalam suatu kelangsungan hubungan luar negeri. Seperti pengaruh dukungan Belanda terhadap RMS yang mempengaruhi hubungan luar negeri Indonesia-Belanda. Konsep pengaruh tersebut yakni:

> "Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan".(Holsti, 1998 : 159)

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya kedalam dua komponen : Politik adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik itu sendiri berakar pada konsep "pilihan": memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar

negeri berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Didalam politik luar negeri ada satu perangkat atau instrumen yang mendukung berjalannya politik luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan politik luar negeri yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara yakni kebijkan luar negeri. Dimana menurut Rosenau:

> "Pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangkaan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan interbal dan kebutuhan eksternal termasuk didalmnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa".

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh sebuah pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional di lingkup domestik dalam internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisa kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodek meninjau dan melaksanakan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Sementara itu didalam Kebijakan Luar Negeri sendiri suatu negara dituntut berperan aktif demi memperoleh keuntungan, dimana menurut Holsti:

"Lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut."

Tujuan politik luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Untuk itu penulis mengambil kesimpulan, demi mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam sila Pancasila yang ke-III yaitu "Persatuan Indonesia", pemerintah Indonesia lebih menggunakan tujuan kebijakan luar negeri yan bersifat jangka panjang untuk menyelesaikan masalah gerakan separatis di Indonesia seperti RMS demi tercapainya perdamaian, keamanan dan persatuan Indonesia.

Sementara itu Plato berpendapat bahwa setiap kajian luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedag berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menajangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkjan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau memperthankan kebijakan ihwal kenegaraan di lingkungan internasional.

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melaui para perumus kebijaksanaan nasional mempu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan bertahan lama waktunya tujuan politik luar negeri

dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat semnetara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

K. J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara yaitu :

1. Nilai yang menjadi tujuan dari pembuat keputusan
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mancapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan kata lain ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional yang didefenisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis :

1. *Core/Basic/Vital Interest* ; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari *Core/Basic/Vital Interest ini*.
2. *Secondary Interest,* meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya.

Dari landasan kepentingan nasional diatas bahwa sangat jelaslah demi mempertahankan kepentingan yang nilainya sangat tinggi bagi bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi daerah-daerah wilayahnya, yakni Maluku Selatan yang sejak diproklamasikannnya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah masuk dalam wilayah NKRI, untuk itu pemerintah Indonesia bersedia melakukan berbagai cara baik dengan menggunakan cara militer maupun perundingan untuk mempertahankan Maluku Selatan sebagai bagian dari wilayahnya.

Pertemuan berbagai politik luar negeri dari berbagai negara disebut dengan politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok dalam hubungann internasional. Ruang lingkup politik internasional terbatas hanya pada interaksi antar negara-negara yang berdaulat saja. Politik internasional merupakan salah satu wujud interkasi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara-negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

Menurut Perwita dan Yani dalam buku Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah dan lingkungan, atau suatu proses interaksi, interelasi aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interkasi yang didasari pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak uang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan dan konflik" (Perwita & Yani, 2005 : 40)

Adapun pendekatan realis yang dapat digunakan dalam menganalisa hubungan luar negeri Indonesia-Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan.

Pendekatan realis adalah pendekatan yang fokus perhatiannya kepada pola state-centric, artinya kepentingan nasional adalah kepentingan diatas segalanya.

> Menurut Hans J. Morgenthau power dan kekuasaan nasional merupakan pilar utama dalam politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan power dan kepentingan nasional serta asumsi-asumsinya yang state-centric mengahruskan setiap negara senantiasa membuat strategi diplomasi yang harus didasarkan kepada kepantingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal, dan ideologi yang dianggapnya uropis dan bahkan berbahaya. (Mas'oed, 1990 : 139-140).

Pendekatan realis juga mengatakan negara memegang peranan kunci dalam membuat kebajikan untuk menyelesaikan kepentingan-kepantingan yang dapat menciptakan situasi kondusif bagi keamanan nasionalnya. Oleh karena itu bagi Indonesia mempertahankan daerah Maluku sebaga bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal

yang sangat penting. Dan penyelesaiannya harus menguntungkan semua pihak,Maksud menguntukan disini yakni pemerintah Indonesia harus menggunakan penyelesaian masalah ini dengan jalur perundingan dimana pihak aktivis RMS, pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia duduk bersama dan mencari jalan keluar bersama yang dapat menguntungkan semua pihak.

> "Realisme strategis intinya memfokuskan perhatian pada pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Ketika para pemimpin negara menghadapi isu-isu mendasar diplomatik dan militer mereka wajib berpikir secara strategis yaitu secara instrumental jika mereka berharap untuk berhasil". (Schelling 1980 ; 1996)

Sementara itu penulis mencoba mengaitkan objek penelitian ini dengan teori sosiologi konflik.

> "Menurut Wallace dan Wolf kontribusi penting dalam tradisi sosiologi konflik, yaitu pertama, konflik sosial sebagai suatu hasil dari faktor-faktor lain dari pada perlawanan kelompok kepentingan; kedua, memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial". (Wallace dan Wolf, 1995 : 154). Dimana kepentingan-kepentingan semu menjadi nyata tatkala ada proses penyadaran yang dilakukakn oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan. Sehingga mereka menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Proses ini membutuhkan bentuk kesadaran pada kepentingan yang nyata, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase inilah terjadi proses pembentukan kelompok kepentingan.

Sedangkan menurut Barry Buzan, Frank N. Trager dan Simonie dalam buku-nya *People, State, And Fear ; A Agenda For Internasional Security Studies In The Post Cold Era 2nd edition* mengatakan bahwa:

> "Menurut Barry Buzan, negara merupakan wilayah politis yang meliputi sejumlah populasi yang secara hukum berada dibawah naungan suatu admnistrasi tunggal yang memiliki hak tunggal dengan kedaulatan penuh, tanpa menjadi objek untuk dikendalikan. Karena alasan itulah maka negara sudah barang tertentu berhak dan berkewajiban untuk melindungi wilayah kesatuan dan warga negaranya dari ancaman keamanan yang berasal dari negara maupujn kelompok lain". (Barry Buzan, 19991 : 47)
>
> Sedangkan "Menurut, Frank N. Trager dan Simonie keamanan nasional adalah peran dan kebijakan pemerintah untunk mendapatkan tujuan-tujuannya dengan menciptakn kondisi politik nasional dan internasional yang baik untuk melindungi dan melanjutkan nilai-nilai nasional yang penting terhadapa keberadaan musuh yang kuat". (Barry Buzan, 1991 : 47)

> Dalam hubungan keamanan, "Wilayah diartikan sebagai suatu subsistem yang penting dan jelas dari hubungan keamanan yang berbeda diantara kumpulan negara-negara yang secara kebetulan posisi mereka sudah terkunci didalam geografi yang saling berdekatan anatara satu dengan yang lain". (Barrya Buzan 1991 : 87)

Untuk itu kebijakan Pemerintah Indonesia bagi para kelompok kepentingan aktivis RMS dan Pemerintah Belanda yang diisukan mendukung gerakan separatis di wilayah bagian timur Indonesia ini harus lebih kuat dan tegas lagi dengan menggunakan berbagai peneyelesaian yang dapat menguntukan semua pihak. Misalnya keuntungan bagi RMS sendiri yaitu pembangunan yang merata dan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku yang selama ini belum pernah merasakan karena konsentrasi pemerintah Indonesia lebih fokus terhadap pembangunan daerah pusat.

Apabila semua telah terselesaikan, maka tujuan utama bangsa Indonesia yang juga tercantum dalam sila ke-3 yakni Persatuan Indonesia akan tercapai. Dan seluruh masyarakat Indonesia akan hidup aman dan damai.

1.6.2 Hipotesis

Dengan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti menarik hipotesis yang akan di uji dalam penelitian selanjutnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Dengan adanya pandangan Pemerintah Indonesia mengenai eksistensi RMS sebagai kelompok separatis di Belanda dan biasnya tafsiran pemerintah Belanda dalam memberikan suaka bagi aktivis RMS, maka hubungan luar negeri Indonesia - Belanda kedepannya akan sulit menemukan babak baru karena faktor kesejarahan antara kedua negara lebih dominan".

1.6.3 Defenisi Operasional

Melihat pada pembatasan masalah, maka disini akan dijelaskan suatu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah Gerakan Separatis Republik Maluku selatan, sedangkan variabel dependen adalah dampak dari gerakan separatis RMS

terhadap Hubungan luar negeri Indonesia-Belanda (2007-2010).

Variabel independen yaitu Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan. Konsep mengenai gerakan separatis tersbut terdiri dari:

1. Republik Maluku Selatan adalah suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, gerakan ini diprakarsai oleh beberapa kelompok masyarakat Maluku pro Belanda yang merasa terancam jika Indonesia benar-benar merdeka. Pasca ditumpas oleh pasukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat), para pendukung RMS pun mengungsi ke negeri Belanda, mereka diberikan kebebasan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda untuk mengadakan sistem pemerintahan disana. RMS hingga saat ini terbukti masih eksis, dan jika tidak segera ditangani secara tepat akan menjadi isu internasional yang dilirik dunia.

Variabel dependen yaitu dampak dari gerakan separatis RMS terhadap Hubungan luar negeri Indonesia-Belanda dapat dijelaskan sebagai berikut :

2. Gerakan separatis RMS merupakan suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia karena sampai saat ini belum dapat terselesaikan, adanya isu campur tangan Belanda dalam gerakan separatis ini membuat hubungan luar negeri Indonesia-Belanda menjadi terancam.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan apa yang ada atau apa yang sudah ada. Penggunaan metode deskriptif analitis ini berusaha untuk mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data atau fenomena tersebut pada masa sekarang. Mempergunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian objek kajian dia atas maka dapat dilihat, “Dampak Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan (RMS) Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia-Belanda (Tahun 2007-2010).

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku-buku, media masa, surat kabar, majalah, atikel, internet serta laporan yang berupa jurnal ilmiah atau hasil catatan penting lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

1. Perpusatakaan Universitas Komputer Indonesia, Kampus 4 Lantai 7 Jln. Dipatiukr No. 114 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Parahyangan, Gedung 9 Lantai 2 Jln. Cimbeleuit No. 94
3. Perpustakaan Universitas Pasundan
4. Pepustakaan Universitas Padjajaran

1.8.2 Waktu Penelitian

Lamanya waktu penelitian yang dugunakan untuk mengumpulkan data-data, Dimulai bulan Oktober 2010, hingga penyusun laporan. Dan perincian selengkapnya dituangkan ke dalam table 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Tabel Rencana Kegiatan Penelitian
Oktober 2010 – Juli 2011

No	Kegiatan	2010			2011							
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts

1.	Pengajuan Judul											
2.	Pembuatan Usulan Penelitian											
3.	Seminar Usulan Penelitian											
4.	Bimbingan Skripsi											
5.	Pengumpulan Data											
6.	Sidang											

1.9 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini maka peneliti akan menjabarkannya sebagai berikut:

BAB I **:** Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi masalah yang meliputi pembatasan masalah dan perumusan masalah, Tujuan dan Kegiatan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Defenisi Operasional, Metode Penelitian dan Teknik pengumpulan data, serta Lokasi dan lamanya penelitian.

BAB II **:** Tinjaun pustaka, pada Bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan subjek yang di teliti. Seperti teori Politik Luar Negeri, Kebijakan Luar Negeri dan Politik Internasional. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang di peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat di jadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang di ajukan.

BAB III **:** Objek penelitian, Bab ini memberikan gambaran-gambaran umum yang berisi objek-objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dalam hal ini mengenai dampak gerakan separatis republik maluku selatan terhadap hubungan luar negeri indonesia/- belanda tahun 2007-2010.

BAB 1V **:** Pada Bab ini laporkan hasil penelitian yang di peroleh selama penelitian serta membandingkan hasil yang di peroleh dengan data pengetahuan yang di publikasikan serta menjelaskan implikasi data tersebut dengan ilmu pengetahuan. Dalam objek penelitian ini akan di jelaskan mengenai dampak gerakan separatis republik maluku selatan sebagai isu adu-domba bentukan belanda yang berpengaruh terhadap hubungan luar negeri indonesia-belanda.

BAB V **:** Penutup, pada Bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran-saran hasil dari pembahasan (BAB IV). Kesimpulan ini dalam bentuk rangkuman yang singkat, jelas serta informatif.